

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Gerakan separatisme yang terjadi di Papua menarik untuk dicermati karena beberapa alasan, antara lain: (1) Papua saat ini adalah satu-satunya Provinsi di Indonesia yang proses integrasinya melalui mekanisme Internasional dengan penentuan jajak pendapat (PEPERA); (2) Gerakan separatisme di Papua menunjukkan watak gabungan antara pemahaman tradisional suku-suku dengan simbolisasi pemujaan terhadap koreri atau bintang kejora di satu sisi, dan di sisi lain dipimpin oleh orang-orang yang dididik ideologi kebangsaan secara modern untuk melakukan lobi-lobi politik yang bermartabat; (3) Gerakan separatisme di Papua ini bertahan lama dan selalu mampu memperbaharui kepemimpinannya.¹

Dari beberapa alasan diatas yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian adalah bagaimana proses separatisme yang terjadi di papua begitu lama. Konflik Papua memiliki satu hal unik, yang membedakannya dengan konflik-konflik lokal lain di Indonesia. Keunikan ini adalah adanya nasionalisme Papua yang telah tertanam di dalam diri rakyat Papua selama puluhan tahun. Rasa nasionalisme tersebutlah yang mendorong rakyat Papua membenci adanya penjajahan terhadap mereka, baik yang dilakukan Belanda maupun Indonesia. Umumnya kekerasan di Papua terkait dengan konflik antar warga dengan suku,

¹ Amiruddin al Rahab, "Gerakan Papua Merdeka: Penciptaan Identitas Ke-Papua-an Versus Ke-Indonesia-an", *Jurnal Dignitas*, Volume III/No.1/2005.

separatisme, dan kriminalitas. Proses dan hasil pembangunan di Papua selama otonomi khusus belum dirasakan sepenuhnya oleh orang asli Papua, terutama di wilayah pedalaman. Konflik di Papua bersumber pada perbedaan kepentingan antara masyarakat Papua dengan pemerintah Indonesia yang kurang memperhatikan tentang kesejahteraan bagi masyarakat Papua. Pada awalnya tujuan gerakan masyarakat Papua adalah untuk memberi perhatian khusus terhadap pemerintah pusat tentang kondisi ekonomi, sosial, dan budaya yang dirasakan rakyat Papua, namun pemerintah pusat merasa bahwa setelah diberikan otonomi khusus maka kepentingan mereka telah dipenuhi.

Konflik mulai mengalami eskalasi ketika gerakan Operasi Papua Merdeka (OPM) menyebarkan isu separatism dari NKRI. Perwujudan dengan mengibarkan bendera Bintang Kejora pada saat ulang tahun Gerakan OPM. Pihak pemerintah menanggapinya dengan tindakan represif oleh Militer Penindasan militer di tanah Papua meliputi beberapa bentuk, antara lain intimidasi, teror, penyiksaan, dan pembunuhan. Intimidasi, teror dan penyiksaan dilakukan berkenaan dengan pengambil-alihan hak-hak adat masyarakat Papua atas SDA secara paksa untuk berbagai keperluan seperti transmigrasi, pertambangan, dan industri manufaktur maupun jasa wisata. Ketika penduduk asli berusaha mempertahankan hak-haknya atas SDA mereka diintimidasi dan diteror. Otonomi khusus sebagai kebijakan pemerintah dalam upaya menyelesaikan konflik kekerasan yang terjadi di Papua tersebut berjalan tidak efektif atau tidak berhasil hingga sekarang menyebabkan masalah ini belum sampai pada titik aman.

Kesimpulannya adalah bahwa kegiatan separatis, teror dan pembunuhan yang dijalankan oleh OPM hingga saat ini terbilang belum efektif, karena OPM saat ini memasuki babak baru, yaitu adanya Internasionalisasi kasus Papua dimana dengan mendirikan kantor perwakilan di Oxford pada 28 April 2013 yaitu sebagai media kampanye internasional untuk menarik simpatik dari masyarakat Internasional.

B. Latar Belakang Masalah

Sejak pertengahan 2000-an, US House of Representatives, telah mengagendakan agar DPR Amerika tersebut mengeluarkan rancangan *Foreign Relation Authorization Act* (FRAA) yang secara spesifik memuat referensi khusus mengenai Papua. Jika RUU ini lolos, berarti ada beberapa elemen strategis di Washington yang memang berencana mendukung sebuah opsi untuk memerdekakan Papua secara bertahap. Dan ini berarti, sarana dan perangkat yang akan dimainkan Amerika dalam menggolkan opsi ini adalah, melalui operasi intelijen yang bersifat tertutup dan memanfaatkan jaringan bawah tanah yang sudah dibina CIA maupun intelijen Departemen Luar Negeri Amerika. Bukan melalui sarana invasi militer seperti yang dilakukan George W. Bush di Irak dan Afghanistan. Dan hal ini, sudah terbukti melalui MoU Helsinki untuk Aceh. Uni Eropa memang sejauh ini memang sudah menjadi pemain sentral di Aceh pasca MoU Helsinki. Misalnya saja Pieter Feith, Juha Christensen sementara dari

persekutuan Inggris, Australia dan Amerika, mengandalkan pemain sentralnya pada Dr Damien Kingsbury dan Anthoni Zinni.²

Mereka semua ini dirancang sebagai agen-agen lapangan yang tujuannya adalah memainkan peran sebagai mediator, ketika skenario jalan buntu terjadi antara pihak pemerintah Indonesia dan gerakan separatis. Ketika itulah mereka-mereka ini menjadi aktor-aktor utama dari skenario internasionalisasi Aceh, Irian Jaya, dan daerah-daerah lainnya yang berpotensi untuk memisahkan diri dari NKRI. Motivasi para penentu kebijakan luar negeri Amerika memang bisa dimengerti. Karena dengan lepasnya daerah-daerah tersebut, Amerika bisa mengakses langsung kepada para elite daerah tanpa harus berurusan dengan pemerintahan di Jakarta seperti sekarang ini..

Departemen Luar Negeri AS sampai harus meladeni seorang anggota parlemen seperti Eni Faleomavaega. Dan ternyata manuver Eni tidak sebatas di Amerika saja. Melalui LSM yang di bentuknya, *Robert Kennedy Memorial Human Right Center*, Eni dan 9 orang temannya dari Partai Demokrat, melakukan tekanan terhadap Perdana Menteri John Howard, agar memberi perlindungan terhadap 43 warga Papua yang mencari suaka di di Australia. Alasannya, mereka ini telah menjadi korban pelanggaran HAM TNI. Di Australia, Bob Brown,

² Hendrajit, 2013, Papua Merdeka Amerika-Inggris-Australia-Belanda, Mata-Rantai Gerakan Internasionalisasi Untuk Papua Merdeka, Diakses dari:
http://www.theglobalreview.com/content_detail.php?lang=id&id=12964&type=99#.UnsHhVPS1W8

politisi Partai Hijau Australia, juga mendukung gerakan pro Papua Merdeka, dengan mendesak pemerintahan Howard ketika itu untuk mendukung proses kemerdekaan Papua. Pemerintah Australia memberikan visa sementara kepada 42 pencari suaka asal Papua. Hubungan diplomatik Australia-RI jadi memanas, apalagi berkembang isu ketika itu bahwa ke-43 warga Papua cari suaka ke Australia itu sebenarnya merupakan “agen-agen binaan” Australia yang memang akan ditarik mundur kembali ke Australia. Artinya, permintaan suaka itu hanya alasan saja agar mereka tidak lagi bertugas menjalankan operasi intelijen di Papua. Menurut Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan waktu itu, Widodo AS. Menurut Widodo, pemberian visa sementara kepada warga Papua oleh Australia, telah membenarkan adanya spekulasi adanya elemen-elemen di Australia yang membantu usaha kemerdekaan Papua. Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang secara mengejutkan mengembangkan manuver internasionalnya lewat *Free West Papua Campaign*, kiranya perlu dicermati secara intensif dan penuh kewaspadaan.³ Pada 28 April 2013 lalu, kantor perwakilan OPM di Oxford, Inggris secara resmi dibuka. Hal ini mengindikasikan semakin kuatnya arah internasionalisasi isu Papua tidak saja di Amerika Serikat, Australia melainkan juga di Inggris dan Belanda.

Menurut Hikmahanto, tidak hanya OPM yang membangun perwakilan di Inggris. Ada berbagai kelompok separatisme dari negara lain juga mendirikan basis organisasinya di Inggris. Salah satunya adalah Gerakan Tibet Merdeka yang

³ Ibid.

dibentuk untuk melepaskan negeri Tibet dari Republik Rakyat Cina. Karenanya, tidak hanya Indonesia yang mengalami kasus semacam ini.⁴ Hadirnya beberapa warga Inggris pendukung Papua merdeka seperti Andrew Smith, Jennifer Robinson dan Charles Forester dianggap sebagai kekuatan besar, sebenarnya, ketiga aktivis dan para simpatisan yang mendukung aksi tersebut memang mendukung gerakan kemanusiaan yang bukan hanya Papua, tapi juga gerakan Free Tibet, mendukung Suku Kurdistan Iraq. Menurut Seorang warga London asal Indonesia yang merupakan mantan penyiar BBC London, menyatakan bahwa kegiatan yang berbau aktivisme suatu kelompok melawan otoritas negara di Inggris memang terpusat di Oxford, sebagai Universitas tertua di Inggris. Kampus Oxford merupakan sentra aktivis yang menyuarakan dukungan pada perjuangan Tibet, Kurdistan, dan Aung San Su Kyi.⁵

Jadi penulis menganggap hal ini ialah sebuah pertanyaan besar, bagaimana internasionalisasi konflik Papua di pengaruhi oleh beberapa Negara, yaitu : Amerika dan Australia, dan menjadi perhatian khusus penulis adalah pemilihan Inggris sebagai kantor perwakilan OPM menjadi topik yang sangat baik untuk diteliti.

⁴ Hikhmanto Juwana , 2013, *Pendirian kantor OPM Siasat Beny Wenda*, Diakses dari : <http://m.obornews.com/page/category/?page=3&id=22885>, Diakses Tanggal 28 November

⁵ Indonesia timur voice, diakses dari : <http://indonesiatimurvoice.blogdetik.com/2013/06/14/menyoal-peresmian-kantor-free-west-papua-campaign-di-oxford-inggris/>, diakses pada tanggal 23 Desember

C. Rumusan Masalah

Dari pembahasan sejarah latar belakang peresmian kantor OPM (Organisasi Papua Merdeka) di Inggris, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah :

Mengapa Organisasi Papua Merdeka mendirikan kantor perwakilan di Inggris?

D. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan sumber kepentingan OPM dan hal-hal yang menjadi faktor-faktor penyebab OPM mendirikan Kantor Perwakilan di Inggris.
2. Gagasan ini diharapkan dapat menjadi sarana dalam mengidentifikasi kasus-kasus separatisme yang terjadi di Papua khususnya, maupun pada taraf Internasional pada umumnya.

E. Kerangka Teoritik

Dalam menganalisis permasalahan ini penulis menggunakan teori sebagai alat analisis. Menurut Littlejohn & Karen Foss, teori merupakan sebuah sistem konsep yang abstrak dan hubungan-hubungan konsep tersebut yang membantu kita untuk memahami sebuah fenomena. Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu dalam memahami sebuah fenomena. Sehingga bisa dikatakan bahwa suatu teori adalah suatu kerangka kerja konseptual untuk mengatur pengetahuan dan untuk melakukan beberapa tindakan selanjutnya.

1. Teori Internasionalisasi Konflik

Proses internasionalisasi dapat ditandai dengan sebuah kegagalan dalam menyelesaikan sebuah konflik etnis/ lokal. Kegagalan dalam menyelesaikan konflik membuat pihak-pihak yang terkait dapat mengundang perhatian pihak internasional. Hadirnya peran internasional dalam menyelesaikan konflik pun akan muncul, menjadi pihak ketiga atau mediator, maupun berusaha untuk memperoleh keuntungan dalam menyikapi sebuah konflik.

Menurut Baiq Wardhani, ada 5 faktor yang dapat mempengaruhi proses internasionalisasi konflik, dari konflik lokal menjadi internasional. Konflik etnis meng-internasionalisasi, antara lain :⁶

1. Terdapat dukungan dari pihak luar/eksternal yang berasal dari:

A. *Ethnic kin* dan diaspora

Ethnic kin (kerabat sesama etnis) dan diaspora merupakan aliansi etnis yang berpengaruh kuat pada proses internasionalisasi konflik etnis. Saudara sesama etnis adalah sumber dukungan utama bagi sekelompok etnis yang sedang bertikai. Terdapat kecenderungan keberpihakan dari sebuah kelompok etnis kepada kelompok etnis lain yang terdepresi pada sebuah wilayah di luar wilayah yang dihuni oleh etnis simpatisan tersebut.

Nepotisme etnis ini merupakan gejala yang wajar dan alamiah. Dukungan yang diberikan berdasarkan faktor genetik oleh *blood brothers* berdampak

⁶ Lihat Baiq Wardhani, (hal 16-17) Dari Lokal ke Internasional: Mengamati Gejala Internasionalisasi, Diakses Dari : http://www.academia.edu/902464/Dari_Lokal_ke_Internasional

signifikan bagi etnis yang sedang menghadapi pertikaian, baik dengan negara (konflik vertikal) maupun dengan kelompok etnis lain (konflik horizontal). Menurut teori nepotisme etnis *a la* Berghe, terdapat kecenderungan predisposisi perilaku yang bersifat umum 'untuk berfihak pada organisme yang memiliki hubungan biologis dengan *si* aktor'. Semakin dekat hubungan kekerabatan, semakin kuat preferensi perilakunya. Dengan demikian terdapat kecenderungan favoritisme dalam perilaku mendukung konflik berbasis etnis.

Dalam konflik etnis pemisahan diri, dukungan bagi *ethnic kin* diberikan ketika *ethnic kin* mendapat represi dari pihak (negara/rejim/aktor) lain. Pada umumnya pihak pemberi dukungan pada *ethnic kin* di tempat lain berpegang pada prinsip *conventional wisdom*. Prinsip ini tidak memungkinkan sebuah negara yang mengalami konflik etnis serupa di negaranya sendiri memberi dukungan pada *ethnic kin* yang hendak memisahkan diri dari negara induknya (Saideman 2001, 2). Prinsip ini masih dipertahankan sebagai sebuah norma standar, namun di sisi lain prinsip ini sering sulit untuk dipatuhi oleh para aktor. Komunitas diaspora merupakan kelompok etnis yang bermigrasi dan menetap di luar wilayah negara induknya (*home country*) yang secara potensial dapat berperan ganda, sebagai pihak yang membantu resolusi konflik dengan peran intervensi konstruktifnya maupun pihak yang membantu meningkatkan intensitas aspek kekerasan (*violence*) di negara induk. Zunzer (2004, 13) menekankan bahwa diaspora memiliki potensi untuk menjadi pihak yang dapat membantu transformasi konflik etnis berkepanjangan (*protracted*). Diaspora dapat menjalankan perannya melalui,

“supporting the conflicting parties as they argue about ways to achieve a negotiated settlement and empowering them, in the medium term, to initiate a sustainable process for overcoming the conflict causes by themselves. This in turn means that conflict prevention and conflict transformation activities are interdependent and must involve key state and civil society actors.”⁷

B. Negara

Negara masih merupakan kekuatan dominan dalam politik internasional dan negara merupakan salah satu aktor pendukung proses internasionalisasi konflik etnis. Keterlibatan negara sebagai pihak ketiga dalam konflik etnis di suatu negara bukanlah sebuah kenyataan baru. Sebuah negara yang terlibat dalam konflik etnis dapat berperan sebagai pihak pendamai maupun sebagai pihak yang memperkeruh konflik. Sekali pun banyak aktor-aktor non-negara memberi dukungan pada salah satu kelompok etnis yang bertikai, dukungan yang mereka berikan tidak melebihi skala dan jumlah dukungan yang diberikan oleh negara. Pada era Perang Dingin, dukungan negara membawa dampak besar pada efektivitas perjuangan kelompok etnis. Penelitian Byman et al (2001, 10) menunjukkan bahwa negara merupakan sponsor penting pemeliharaan konflik etnis dengan memberikan bantuan militer, politik dan kegiatan logistik, baik dalam skala terbatas maupun besar. Salah satu contohnya adalah Libya yang secara aktif membantu Gerakan Aceh Merdeka. Dukungan tersebut setidaknya terjadi sampai dengan tahun 1991. Terbatasnya jumlah personel dan logistik yang didapatkan GAM, menyebabkan organisasi ini tidak memiliki potensi berkembang untuk menjadi konflik internasional.

⁷ Wardhani, Op.Cit, Hal 19-20

2. Menghasilkan Pengungsi

Pengungsi yang merupakan korban kekerasan politik di negaranya, merupakan salah satu indikator yang dapat diidentifikasi sebagai faktor internasionalisasi konflik etnis. Pertikaian etnis di sebuah negara secara signifikan dapat meningkatkan jumlah pengungsi ke negara lain dan kedatangan pengungsi di tempat baru tersebut secara potensial dapat menimbulkan berbagai konflik baru yang berdimensi ekonomi, sosial maupun politik. Sejak tahun 1980an pengungsi lebih banyak dihasilkan oleh konflik etnis daripada oleh bencana alam atau konflik-konflik lain (Weiner 1996 dalam Saideman 2001, 3).

3. Melibatkan PBB dalam resolusi konflik etnis

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan organisasi internasional yang memiliki tanggung jawab dalam mencari jalan keluar atas berbagai konflik etnis yang terjadi. Peran PBB sebagai badan dunia penyelesaian konflik etnis selama ini dianggap kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh berbagai persoalan, baik substansi maupun teknis. Terdapat dua hal penting dalam melihat keterlibatan PBB dalam resolusi konflik etnis. Pertama, PBB seringkali mengalami kesulitan menempatkan diri sebagai pendamai karena harus berhadapan dengan berbagai kepentingan yang tumpang tindih dari aktor-aktor yang terlibat dalam konflik etnis.

Kedua, sekalipun PBB sulit berposisi tegas dalam urusan konflik etnis, namun tidak jarang berbagai persoalan konflik etnis mengharuskan PBB untuk terlibat, baik sebagai penjaga perdamaian, mediator maupun manajemen pemberian bantuan pada hal-hal yang terkait dengan konflik etnis. Idealnya PBB

adalah pihak ketiga yang dapat diterima pihak-pihak yang bertikai sebagai pendamai.

4. Berkaitan dengan terorisme internasional

Konflik etnis yang melibatkan unsur kekerasan seringkali menggunakan cara-cara terorisme untuk mencapai tujuannya. Fakta ini bukan merupakan hal yang baru karena banyak kasus membuktikan hal tersebut. Tidak saja konflik etnis yang terjadi di negara sedang berkembang (LTTE, Jammu-Kashmir), hal serupa yang terjadi di negara maju pun (IRA, Basque) menggunakan taktik yang sama. Sekalipun demikian tidak berarti semua konflik yang menggunakan taktik terorisme internasional diidentifikasi dengan konflik yang berdimensi terorisme internasional. Beberapa kelompok pemberontak etnis menggunakan atau memanfaatkan jaringan teroris internasional untuk mencapai tujuannya. Misalnya kelompok MILF (Moro Islamic Liberation Front) dan MNLF (Moro National Liberation Front) yang bekerjasama dengan Abu Sayyaf, salah satu jaringan Al Qaeda di Asia Tenggara.

5. Terdapat elemen iredentisme

Iredentisme merupakan topik yang tidak populer dalam ilmu hubungan internasional. Gerakan ini sering dikesampingkan karena dianggap sebagai bagian dari gerakan pemisahan diri (*secessionism*) sehingga tidak pernah mendapat penjelasan yang memadai. Selain itu gerakan ini dipandang *anachronistic* (ketinggalan zaman), berbeda dengan *secessionism* yang dapat ditemukan penjelasannya dalam filsafat politik modern tentang hak penentuan nasib sendiri (*self-determination*). Iredentisme berasal dari kata "*terra irredenta*" yang berarti

tanah tak tertebus. Iredentisme mencakup pengertian keinginan sebuah wilayah bergabung dengan wilayah/negara lain. Pada dasarnya iredentisme muncul karena terdapat keinginan dari salah satu pihak negara yang berdekatan untuk ‘melindungi’, ‘menyelamatkan’ atau ‘membebaskan’ saudara se-etnisnya yang menjadi minoritas di wilayah negara tetangganya tersebut.

Dalam hal ini, konflik Papua telah mengalami proses internasionalisasi yang begitu panjang, dimana keterpihakan internasional sebagai pihak ketiga berupaya membantu penyelesaian konflik. Keterlibatan PBB dalam membantu menyelesaikan konflik etnis ini dianggap sebagai sebuah momentum penting dalam upaya mencari keadilan. Kuatnya keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI menjadikan OPM berupaya dalam mencari keadilan dan pengakuan internasional. Mempengaruhi pihak asing dalam setiap isu-isu yang berupa kekerasan, HAM, maupun tidak adanya kemakmuran yang diberikan oleh Indonesia.

2. Konsep Marketing politik

Menurut Adman Nursal, bahwa pada dasarnya *political marketing* adalah serangkaian aktivitas terencana, strategis, tapi juga taktis, berdimensi jangka panjang dan jangka pendek, untuk menyebarkan makna politik kepada para pemilih. Tujuannya untuk membentuk dan menanamkan harapan, sikap,

keyakinan, orientasi dan perilaku pemilih. Perilaku pemilih yang diharapkan adalah ekspresi mendukung dengan berbagai dimensinya.⁸

Pemasaran politik harus dilihat secara komprehensif. Pertama, pemasaran politik lebih daripada sekedar ilmu politik. Kedua, pemasaran politik diaplikasikan dalam seluruh proses organisasi partai politik. Tidak hanya tentang kampanye politik tetapi juga sampai pada tahap bagaimana memformulasikan produk politik melalui pembangunan simbol, image, platform dan program yang ditawarkan. Ketiga, pemasaran politik menggunakan konsep pemasaran secara luas. Keempat, pemasaran politik melibatkan banyak disiplin. Kelima, konsep pemasaran politik bisa diterapkan dalam berbagai situasi politik.⁹ Pemasaran politik memang tidak menjamin sebuah kemenangan, tapi menyediakan tools bagaimana menjaga hubungan dengan pemilih untuk membangun kepercayaan dan selanjutnya memperoleh dukungan suara.¹⁰

Implementasi konsep political marketing pernah dimanfaatkan oleh salah satu pemimpin dunia yaitu, pasangan Bill Clinton dan Al Gore tahun 1990-1992 dalam persaingan antar kontestan menjadi kandidat atau calon Presiden dan Capres Amerika Serikat. Sebagai kampiun demokrasi dan sekaligus menjadi tonggak penting sejarah dalam penerapan konsep-konsep pemasaran politik secara efektif untuk berkompetisi dalam Pemilu secara bebas dan langsung

⁸ Adman Nursal, 2004, *Political Marketing*, (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta), Hal. 23

⁹ Harris dalam Firmanzah, 2012, *Marketing Politik*, (Yayasan Obor Indonesia, Jakarta), Hal.156

¹⁰ Shaughnessy dalam Firmanzah, *Op.Cit*, Hal 197

meraih suara terbanyak, tahapan selanjutnya berhasil memenangkan pertarungan dan terpilih menjadi Presiden AS ke-45, periode 1993 – 2001. Menurut Baines bahwa :

“Perkembangan political marketing yaitu pelaksanaannya dimulai dari negara-negara maju dengan sistem demokrasi seperti pemerintah Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan dan hingga negara berkembang seperti Indonesia”. Pada tahun 1830-an seorang praktisi periklanan profesional Charles Baker telah menciptakan suatu konsep iklan politik sebagai alat media promosi pemasaran politik, dan definisi pemasaran politik kini telah banyak mengalami perubahan-perubahan dari konsep dan tujuannya, yaitu : ¹¹

1. Menurut konsep Shama (1975) & Kotler (1982) yang memberikan penekanan pada proses terjadinya transaksi antara pemilih dan kandidat.
2. Lock & Harris (1996) yang mengusulkan agar pihak political marketing memperhatikan positioning and segmentation para kandidat atau parpol.
3. O'Leary & Iradela (1976), yaitu perhatiannya dalam penggunaan marketing-mix untuk mempromosikan partai-partai politik kepada khalayak sasarnya.
4. Wring (1997) lebih memperhatikan penggunaan survei atau riset opini publik dan termasuk analisis lingkungan.

¹¹ Adman Nursal, op.cit, Hal. 8

Menurut Firmanzah, dalam proses Political Marketing, digunakan penerapan 4Ps, yaitu:¹²

1. Produk (product) berarti partai, kandidat dan gagasan-gagasan partai yang akan disampaikan konstituen. Produk ini berisi konsep, identitas ideologi. Baik dimasa lalu maupun sekarang yang berkontribusi dalam pembentukan sebuah produk politik.
2. Promosi (promotion) adalah upaya periklanan, kehumasan dan promosi untuk sebuah partai yang di mix sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, pemilihan media perlu dipertimbangkan.
3. Harga (Price), mencakup banyak hal, mulai ekonomi, psikologis, sampai citra nasional. Harga ekonomi mencakup semua biaya yang dikeluarkan partai selama periode kampanye. Harga psikologis mengacu pada harga persepsi psikologis misalnya, pemilih merasa nyaman, dengan latar belakang etnis, agama, pendidikan dan lain-lain . Sedangkan harga citra nasional berkaitan dengan apakah pemilih merasa kandidat tersebut dapat memberikan citra positif dan dapat menjadi kebanggaan negara.
4. Penempatan (place), berkaitan erat dengan cara hadir atau distribusi sebuah partai dan kemampuannya dalam berkomunikasi dengan para pemilih. Ini berarti sebuah partai harus dapat memetakan struktur serta karakteristik masyarakat baik itu geografis maupun demografis.

¹² Firmanzah, op.cit, Hal. 200-208

Dapat disimpulkan bahwa inti dari political marketing adalah mengemas pencitraan, publik figur dan kepribadian dari sebuah individu maupun organisasi yang terlibat pada pemasaran politik.

Erat kaitannya dengan kepentingan OPM dalam menentukan tempat dalam mendirikan kantor OPM di Inggris. Dalam setiap pemasaran politiknya OPM menggunakan sebuah produk yaitu isu-isu yang menyatakan bahwa pemerintah Indonesia telah memanfaatkan Papua sebagai sumber keuntungan yang dimana tidak terjaminnya kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat Papua. Otonomi khusus dianggap sebagai sebuah cara pemerintah Indonesia demi menguasai sumber daya alam Papua. Kekerasan dan pelanggaran HAM adalah bentuk kekejaman Pemerintah Indonesia dalam mengamankan wilayah Papua. Bentuk isu ini sebagai media kampanye OPM di berbagai Negara dunia. Pembukaan kantor perwakilan OPM di Inggris sendiri dapat menimbulkan dampak pandangan negatif dari masyarakat Internasional terhadap Indonesia. Sementara OPM sendiri dapat menarik simpati dari masyarakat di dunia. OPM dalam hal ini sedang berusaha mencari perhatian masyarakat internasional untuk memperoleh tanggapan dan reaksi yang diinginkan agar tercapai segala macam tujuan dan cita-cita OPM.

F. Hipotesa

Kegagalan dimasa lalu tidak membuat OPM menghentikan tujuannya memisahkan diri dari NKRI, namun kegagalan itu membuat OPM mencoba strategi baru, yaitu mendirikan kantor perwakilan di Oxford-Inggris. Adapun

penyebab babak baru separatisme di Papua dipengaruhi oleh 2 faktor : 1. Faktor internal, artinya bahwa OPM menyimpulkan gerakan militernya tidak efektif. 2. Faktor eksternal, yaitu bentuk proses pembelajaran OPM dalam menjalankan kampanye Internasional dan adanya komitmen internasional terhadap konflik Papua.

G. Jangkauan Penelitian

Dalam pembahasan masalah tersebut, dan untuk menjaga kedisiplinan penulis terhadap masalah yang diangkat, maka penulis membatasi jangkauan penelitian ini, fokus penelitian pada kantor perwakilan OPM yang berada di Oxford- Inggris sebagai bentuk babak baru separatisme Papua.

H. Metode Penelitian

Dalam kamus bahasa Indonesia metode diartikan sebagai cara yang teratur dan sistematis untuk pelaksanaan sesuatu.¹³ Sedangkan penelitian berarti proses pengumpulan dan analisis yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan begitu metode penelitian merupakan cara untuk mendapatkan sesuatu info yang dituangkan dalam proses yang sistematis guna memenuhi tujuan tertentu. Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagaimana berikut:

¹³ Achmad Maulana, dkk, 2004, Kamus ilmiah Populer, Referensi Ilmiah, Sains, Politik, *Hukum, Sosial dan Budaya, juga dilengkapi dengan Pengetahun Ilmiah dan Umum (Yogyakarta, Absolut,)* hal. 306

Nana Syaodah Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2008). Hal. 5

1. Jenis Penelitian.

Penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang merujuk pada sumber-sumber tertulis buku dan data studi pustaka. Yang dalam hal ini merupakan kantor perwakilan OPM di Inggris: babak baru separatisme papua.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat eksplanatif, yaitu upaya memecahkan masalah yang diselidiki dengan sebelum dan sesudah keadaan objek, yang dalam hal ini adalah didirikannya kantor perwakilan OPM di Inggris: babak baru separatisme papua.

4. Sumber Data

Sumber yang dijadikan acuan dalam penulisan skripsi ini disesuaikan dengan data yang diperlukan, baik yang bersifat primer maupun skunder yang saling melengkapi. Oleh karena kajian skripsi ini bersifat kepustakaan (library research), sumber utamanya adalah informasi terbaru tentang kantor perwakilan OPM di Inggris: babak baru separatisme Papua sedangkan untuk sumber skunder yaitu berasal dari berbagai buku dan literatur yang mendukung.

5. Analisis Data

Analisis data dalam sebuah penelitian merupakan penguraian data melalui tahapan; kategorisasi, klasifikasi, perbandingan, dan pencarian hubungan keterkaitan antara data yang ada secara spesifik. Pertama yang

dilakukan adalah seleksi data yang telah dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan menurut kategori tertentu.¹⁴ Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kuantitatif dengan instrumen analisis deduktif-induktif. Deduksi adalah langkah analisis dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Kemudian dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan yang sekaligus dilakukan perbandingan.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan rangkuman sementara dari sisi skripsi, yakni suatu gambaran tentang isi skripsi secara keseluruhan dan dari sistematika itulah dapat dijadikan satu arahan bagi pembaca untuk menelaahnya. Secara berurutan dalam sistematika ini adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini dikemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka dasar teori, hipotesis penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

¹⁴ Cik Hasan Bisri, 2001, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam, cet. ke-1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,), hlm. 66

Sudarto, , 1996, *Metode Penelitian Filsafat*, (Raja Grafindo Persada: Jakarta), hlm.42-43

BAB II. SEJARAH BERDIRINYA OPM

- A. Faktor-Faktor Munculnya OPM
- B. Struktur Kepengurusan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-OPM)

BAB III. KANTOR PERWAKILAN YANG MENIMBULKAN KONTROVERSI

- A. Landasan Hukum Kebebasan Berekspresi di Inggris
- B. Sikap Indonesia Terhadap Kantor Organisasi Papua Merdeka di Oxford-Inggris
- C. Sikap Inggris Terhadap Kantor Organisasi Papua Merdeka di Oxford-Inggris
- D. Dampak Hubungan Bilateral Indonesia-Inggris

BAB IV . TRANSFORMASI MENUJU INTERNASIONALISASI

- A. Internasionalisasi Konflik Papua
- B. Faktor-Faktor Babak Baru Separatisme Papua
 - 1. Faktor Internal
 - 2. Faktor Eksternal
- C. Kantor Perwakilan Sebagai Media Kampanye
 - 1. Instrumen Marketing Politik
 - 2. Dukungan Internasional

A. International Parliamentarians for West Papua (IPWP)

B. International Lawyers for West Papua (ILWP)

BAB V. Dalam bab terakhir ini, akan disajikan tentang kesimpulan sebagai hasil dari penelitian dan dilanjutkan dengan saran-saran yang sekiranya dapat dijadikan bahan pemikiran bagi yang berkepentingan, kemudian ditambah dengan lampiran yang relevan.